

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Populernya istilah “tata kelola yang baik” atau lebih dikenal dengan istilah *good corporate governance* tidak dapat dilepaskan dari skandal perusahaan yang menimpa perusahaan besar. Baik yang ada di Indonesia maupun Amerika Serikat. Runtuhnya sistem ekonomi komunis menjelang akhir abad ke-20an menjadikan sistem ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang dominan diseluruh dunia. Ciri utama sistem ekonomi kapitalis adalah kegiatan bisnis dan kepemilikan perusahaan dikuasai oleh individu-individu atau sektor swasta.

Sebagaimana dikatakan oleh Joel Bakan (2002) dalam bukunya Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, menjelaskan bahwa perusahaan (korporasi) saat ini telah berkembang dari sesuatu yang relatif tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan dan pengaruh perusahaan ini sedemikian besarnya sehingga telah menjelma menjadi “monster raksasa” yang mendikte hampir seluruh hidup kita, mulai dari apa yang kita makan, apa yang kita lihat, apa yang kita pakai, apa yang kita hasilkan, dan apa yang kita kerjakan.<sup>1</sup>

Salah satu contoh akibat dari praktik bisnis yang tidak etis adalah krisis ekonomi yang menimpa Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, seperti Thailand, Korea Selatan, Hongkong, Filipina, Malaysia serta mega-skandal yang menimpa perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika Serikat. Tidak sulit untuk mencari penyebab utama krisis dan mega-skandal tersebut. Semua itu terjadi karena perilaku tidak etis bahkan cenderung kriminal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar disatu sisi, dan tidak berdayanya aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku pelaku bisnis ini.

---

<sup>1</sup>Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi Tantanagn Membangun Manusia Seutuhnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 98

Pola krisis di Indonesia sebagaimana di negara Asia lainnya sekitar tahun 1997 diawali oleh aksi para spekulen mata uang (yang notabene juga sebagai pelaku bisnis perdagangan mata uang asing) sehingga memberi tekanan berat pada mata uang lokal di beberapa negara di Asia (dolar Hongkong, bath, peso rupiah). Akibatnya terjadi penurunan nilai mata uang lokal, naiknya suku bunga bank, meningkatnya kredit macet, dan anjloknya indeks harga saham (I.P.G Ary Suta dan Soebowo Musa, 2004). Sebelum krisis terjadi, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia di bawah payung beberapa kelompok konglomerat yang mendominasi perekonomian telah melakukan pinjaman dalam valuta asing (US\$) dalam jumlah spektakuler pada lembaga-lembaga perbankan Indonesia. Merosotnya nilai mata uang rupiah menggelembung bagaikan balon sehingga tidak mampu lagi membayar bunga dan cicilan utang mereka kepada pihak bank. Dari itu, kemudian timbul kredit macet yang menimpa lembaga-lembaga perbankan Indonesia. Hal ini menyebabkan efek domino, yaitu hancurnya sistem perbankan di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan krisis ekonomi, politik, dan sosial yang sangat kompleks. Beberapa perusahaan besar di Indonesia yang bermasalah dan tidak mampu lagi meneruskan usahanya akibat *bad corporate governance* antara lain : Bank-Bank pemerintah yang telah dilikuidasi (Bank Pembangunan Indonesia-Bapindo, Bank Dagang Negara-BDN, Bank Bumi Daya-BBD, Bank Export-Import-Bank Exim), PT Indorayon (Sebuah perusahaan pabrik kertas di Sumatra Utara), PT Dirgantara Indonesia (Sebuah pabrik pesawat terbang yang berkantor pusat di Bandung), PT Lapindo Brantas (Sebuah perusahaan eksplorasi minyak dan gas di Sidoarjo, Jawa Timur). Jatuhnya beberapa bank pemerintah pada awal abad ke-21 ini lebih disebabkan oleh kebijakan ekspansi kredit direksi bank tersebut yang tidak bijaksana. Kredit diberikan dalam jumlah yang besar kepada beberapa kelompok usaha besar tanpa melalui suatu kajian yang cermat dan objektif atas studi kelayakan bisnis mereka. Akibatnya, bank-bank pemerintah tersebut mengalami kesulitan keuangan karena

kelompok usaha besar ini tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.

Pada intinya, timbulnya krisis ekonomi di Indonesia ini disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk (*bad corporate governance*) dan tata kelola pemerintahan yang buruk (*bad government governance*) sehingga memberi peluang besar timbulnya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini dapat ditunjukkan pada beberapa fakta berikut : mudahnya para spekulan mata uang untuk mempermainkan pasar valuta asing karena tidak adanya alat kendali yang efektif. Sifat para spekulan ini selalu mementingkan diri sendiri tanpa peduli kepentingan masyarakat ataupun negara, mudahnya para konglomerat memperoleh dana pinjaman dari perbankan. Hal ini dimungkinkan karena para konglomerat itu sekaligus juga menjadi pemilik bank-bank swasta ternama. Melalui rekayasa studi kelayakan dan laporan keuangan, para konglomerat ini menarik pinjaman dari bank miliknya untuk membiayai proyek-proyek usaha yang masih berada dalam kelompok usahanya. Para direksi bank ini tidak dapat bersikap independen karena ditempatkan di bank tersebut oleh para konglomerat tersebut. Para konglomerat ini banyak yang sekaligus merangkap fungsi sebagai pemegang saham, komisaris, dan direksi di kelompok usaha mereka, banyak direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk di bank-bank pemerintah juga tidak independen. Dalam mengambil berbagai kebijakan selalu ada campur tangan dari oknum pejabat pemerintahan. Hal ini tidak mengherankan karena para direksi ini sering kali merupakan kepanjangan tangan kepentingan kelompok oknum pejabat tertentu. Kalaupun mereka bersifat profesional, mereka sering mendapat tekanan oknum pejabat, dan banyaknya profesi yang terkait dengan kegiatan bisnis ini, seperti akuntan publik, perusahaan penilai, konsultan keuangan, dan sebagainya yang mudah diajak bekerja sama untuk merekayasa laporan audit, laporan keuangan, dan laporan penilaian harta (*asset*) perusahaan untuk berbagai keperluan, seperti tender, aplikasi kredit bank, penerbitan saham di bursa dan sebagainya.

Akibat berbagai praktik tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar ini bukan saja telah menimbulkan krisis ekonomi di Indonesia tetapi juga memengaruhi perekonomian Amerika Serikat dan dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintah Amerika Serikat bertindak cepat untuk meredam kepanikan para investor dengan mengeluarkan Undang-Undang yang terkenal dengan nama *Sarbanes-Oxley Act of 2002*. Undang-Undang ini berisi penataan kembali Akuntansi Perusahaan Publik, tata kelola perusahaan dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menjadi acuan awal dalam menjabarkan dan menegakkan GCG, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia.<sup>2</sup>

Untuk menelusuri masalah tata kelola korporat, dapat ditelusuri menggunakan teori agency (*agency theory*). Teori ini menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan, seperti manajer, pemilik perusahaan dan kreditor dalam berperilaku. Masalah tata kelola akan timbul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa :

*“The issue of corporate governance arises because of the separation of ownership from control in modern corporations. When salaried managers run companies on behalf of dispersed shareholders, they may not act in shareholders’ best interest. This agency moral hazard problem could not exist not just between shareholders and creditors and between controlling shareholders and other stakeholders, including suppliers and workers. A sound corporate governance system should provide effective protection for shareholder and creditor such that they are not denied the return on their investment (Zhuang, et al., 2000)*

Ada yang menarik dari penjelasan diatas. *Pertama*, pemilik perusahaan dapat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pemegang saham mayoritas dan minoritas yang dapat saja kepentingannya saling berbenturan satu sama lain. *Kedua*, masalah keagenan antara manajer dengan *shareholders* dapat terjadi, tetapi masalah tersebut akan lebih banyak terjadi pada perusahaan yang kepemilikannya menyebar

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 99-101

(*manager-controlled*) dari pada yang kepemilikannya relatif terkonsentrasi seperti di Indonesia (*owner-controlled*). *Ketiga*, sistem tata kelola yang baik seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan kreditor. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui mekanisme eksternal maupun internal perusahaan. Dua bentuk mekanisme eksternal yang penting adalah mekanisme ekonomi dan mekanisme penegakkan hukum. Zuang et al, 2000 dalam bukunya Mudjarad Kuncoro, 2005 menjelaskan bahwasistem tata kelola korporat tersebut terdiri dari berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah dan *stakeholders* (pemegang saham lainnya), dan berbagai mekanisme yang secara langsung maupun tidak langsung menegakkan peraturan tersebut.<sup>3</sup>

Dengan demikian, *corporate governance* dalam perusahaan sangatlah dibutuhkan untuk menjadikan perusahaan menjadi yang lebih baik. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (SAK, 2007).<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam proses pembuatan laporan keuangan harus dibuat dengan benar dan disajikan secara jujur kepada pengguna laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan juga harus memenuhi kriteria andal dan berkualitas yaitu laporan keuangan yang bebas dari rekayasa, tidak terdapat kesalahan material dan mengungkapkan informasi yang sesuai fakta yang menjadi kepentingan banyak pihak terutama penggunanya (SAK, 2004). Namun, akibat krisis global, banyak perusahaan domestik maupun multinasional serta jasa akuntan publik yang mulai

---

<sup>3</sup>Mudjarad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif ?*, Erlangga, 2005, hlm. 187-188

<sup>4</sup>Vivin Aulia Putri, Ponny Harsanti dan Aprilia Whetyningtyas, *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Audit Tenure, Dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuanagn Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014*, Jurnal Akuntansi, hlm. 1

dipertimbangkan dan diragukan kredibilitasnya disebabkan banyak terjadi manipulasi terhadap data akuntan terlebih pada laporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan khususnya *go public* yang diragukan integritas laporan keuangannya.

Menurunnya integritas laporan keuangan perusahaan akan memicu terjadinya kasus hukum skandal manipulasi informasi akuntansi yang secara langsung melibatkan *Chief Executive Officer (CEO)*, Komisaris, Komite Audit, Internal Auditor hingga Eksekutor Auditor.<sup>5</sup>

Skandal di dalam negeri terlihat dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap 10 kantor Akuntan Publik yang diindikasikan melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi pada tahun 1998. Terungkapnya skandal-skandal sejenis ini menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat keuangan, yang ditandai dengan turunya harga saham secara drastis dari perusahaan yang terkena kasus. Oleh karena itu, masalah *corporate governance*, ternyata mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme *good corporate governance* yang baik belum diterapkan.<sup>6</sup>

Seperti Indonesia juga tidak luput dari kasus-kasus skandal manipulasi laporan keuangan seperti kasus PT Kimia Farma Tbk. dan PT Lippo Tbk. (Ardina 2012). Ningrum (2012) menyatakan bahwa hal tersebut menunjukkan bentuk kegagalan dalam pelaporan yang diindikasikan dengan kegagalan dalam integritas laporan keuangan. *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC)* No. 2 menjelaskan bahwa integritas informasi laporan keuangan adalah kondisi dimana informasi dalam laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak bisa secara jujur menyajikan apa yang dimaksudkan untuk dinyatakan.

---

<sup>5</sup>Oktavia Nicolin dan Arifin Sabeni, *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Audit Tenure, dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, hlm. 1

<sup>6</sup>Pancawarti Hardiningsih, *Pengaruh Independensi, Corporate Governance, Dan Kualiatas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi Volume 2, Nomor 1, Tahun 2010, halm. 62

Integritas laporan keuangan diproksi dengan dua pengukuran, yaitu konservatisme dan manajemen laba.

Pemerintah Indonesia berupaya melindungi pemegang saham serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan membuat peraturan pembentukan dewan komisaris independen dan komite audit pada bulan Juli 2001 (Perwirasari, 2012). Dalam hal pencapaian *good governance* (*governance* (GCG), keberadaan komisaris independen dan dewan direksi diharapkan mampu menyeimbangkan proses pengambilan keputusan terutama dalam integritas informasi dalam laporan keuangan.<sup>7</sup>

Dengan hal ini, menyebabkan munculnya keraguan pihak masyarakat terhadap pihak internal perusahaan terutama terhadap tata kelola dan sistem kepemilikan dalam perusahaan yang tersebar secara luas yang sering disebut *Corporate Governance*, dimana tersaji bahwa *Corporate Governance* yang baik belum diterapkan dalam perusahaan sehingga banyak direktur perusahaan yang menyalahgunakan otoritasnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Selain peran internal perusahaan, peran eksternal yaitu pihak auditor dibutuhkan dalam melakukan pengawasan terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Kualitas audit dalam penilaian integritas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh masa perikatan audit antara auditor dengan klien dan pengalaman audit yang dimiliki.<sup>8</sup>

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti hanya fokus pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* periode 2011-2014. *Jakarta Islamic Index* (JII) adalah index bursa saham atau index harga rata-rata saham yang mulai dibuat pada tanggal 3 Juli 2000 untuk memfasilitasi perdagangan perusahaan publik yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut diantaranya melarang perusahaan yang sahamnya tercantum untuk melakukan aktivitas usaha dengan dasar judi, spekulasi, melakukan sistem perbankan secara

---

<sup>7</sup>N.P.Yani Wulandari, I Ketut Budiarta, *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Komisaris Independen dan Dewan Direksi Terhadap Integritas Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi Volume 7, Nomor 3, Tahun 2014, hlm. 575

<sup>8</sup>Ocktavia Nicolin dan Arifin Sabeni, *Op. Cit*, hlm. 1

konvensional, memproduksi atau memperdagangkan makanan atau minuman yang haram, menyediakan barang atau jasa yang merusak moral & kesehatan, dan lain-lain. Adapun jumlah perusahaan yang ada pada *Jakarta Islamic Index* (JII) berjumlah 30.<sup>9</sup>

Sedangkan alasan yang mendasar dari topik penelitian ini adalah bahwa setiap perusahaan harus menerapkan *Good Corporate Governance*, sehingga penyajian laporan keuangan audit dalam perusahaan dapat dipercaya oleh semua pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “**Pengaruh Struktur *Corporate Governance*, *Audit Tenure*, Dan Spesifikasi Kantortan Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2011-2014**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2011-2014?
2. Bagaimana Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2011-2014?
3. Bagaimana Pengaruh spesifikasi kantortan audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2011-2014 ?

---

<sup>9</sup><http://agenprusyariah.com/jakarta-islamic-index/>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2016 jam 22:07 WIB.

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Mengetahui pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) Tahun 2011-2014.
2. Mengetahui pengaruh Audit *Tenure* Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) Tahun 2011-2014.
3. Dan Mengetahui pengaruh spesifikasi kantortan audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) Tahun 2011-2014..

### D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan memberikan gambaran mengenai sejauh mana kesesuaian antara teori dan fakta yang ada.

b. Bagi Akademisi

Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai integritas laporan keuangan pada perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) Tahun 2011-2014..

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Jakarta Islamic Index

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan *good corporate governance* sehingga diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan yang baik.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat, khususnya pada masyarakat publik.

## E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun :

### 1. Bagian awal

Bagian muka ini, terdiri dari : halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi dan daftar tabel.

### 2. Bagian isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut :

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : LANDASAN TEORETIS**

Bab ini berisi tentang teori agensi, *corporate governance* yang terdiri dari pengertian, prinsip-prinsip, karakteristik dan manfaat *corporate governance*. Struktur *corporate governance* yang terdiri dari komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, audit dan laporan keuangan, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, tata variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, uji asumsi klasik dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi variabel penelitian, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, pembahasan hasil hipotesis.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, rekomendasi, dan penutup.

**3. Bagian akhir**

Bagian akhir ini meliputi daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

